

# **LAPORAN KEUANGAN**

## **BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BONTANG**

**T.A. 2022 AUDITED**



**JL. AWANG LONG NO. 2 KEL. BONTANG BARU, KEC. BONTANG UTARA, KOTA BONTANG**

**TELP: (0548) 26066 | FAX: (0548) 27706**

**HOME PAGE: [HTTP://BONTANGKOTA.BPS.GO.ID](http://BONTANGKOTA.BPS.GO.ID) | EMAIL: [BPS6474@BPS.GO.ID](mailto:BPS6474@BPS.GO.ID)**

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kota Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kota Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BPS Kota Bontang, 22 Mei 2023  
Kepala,  
  
Widiyantono, S.S.T., M.Stat.  
NIP. 197901092000121001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Indeks Singkatan	vii
Struktur Organisasi	viii
Laporan Capaian Kinerja	viii
I. Ringkasan	1
Ii. Laporan Realisasi Anggaran	3
Iii. Neraca	4
Iv. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	8
Vi. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
A.1 Dasar Hukum	9
A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis	11
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4 Basis Akuntansi	13
A.5 Dasar Pengukuran	14
A.6 Kebijakan Akuntansi	14
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	24
B.2 Belanja Negara	27
B.3 Belanja Pegawai	28
B.4 Belanja Barang	29
B.5 Belanja Modal	31
B.5.7 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	32
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	33
C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	33
C.2 Persediaan	33
C.3 Tanah	37
C.4 Peralatan Dan Mesin	38
C.5 Gedung Dan Bangunan	39
C.6 Aset Tetap Lainnya	39
C.7 Akumulasi Penyusutan	41
C.8 Aset Tak Berwujud	41

C.9 Aset Lain-lain	42
C.10 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	43
C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga	44
C.12 Ekuitas	45
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	46
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	46
D.2 Beban Pegawai	46
D.3 Beban Persediaan	49
D.4 Beban Barang Dan Jasa	49
D.5 Beban Pemeliharaan	52
D.6 Beban Perjalanan Dinas	54
D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi	55
D.8 Kegiatan Non Operasional	56
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	58
E.1 Ekuitas Awal	58
E.2 Surplus/defisit-lo	58
E.3 Koreksi Menambah/mengurangi Nilai Ekuitas	58
E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi	58
E.3.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	59
E.4 Transaksi Antar Entitas	59
E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain (dkel)	60
E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar	60
E.5 Ekuitas Akhir	61
F. Pengungkapan Lainnya	62

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Uraian Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	16
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	18
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	19
Tabel 4	Rincian Anggaran	21
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	24
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan	26
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	27
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja	27
Tabel 9	Perbandingan Belanja Pegawai	28
Tabel 10	Perbandingan Belanja Barang	29
Tabel 11	Realisasi Belanja Barang Akun Khusus COVID-19	30
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	31
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32
Tabel 14	Rincian Belanja Dibayar di Muka	33
Tabel 15	Rincian Persediaan	34
Tabel 16	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	41
Tabel 17	Rincian Aset Tak berwujud	42
Tabel 18	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	44
Tabel 19	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	44
Tabel 20	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	46
Tabel 21	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	46
Tabel 22	Rincian Beban Pegawai	47
Tabel 23	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	48
Tabel 24	Rincian Beban Persediaan	49
Tabel 25	Rincian Beban Barang dan Jasa	50
Tabel 26	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	51
Tabel 27	Rincian Beban Pemeliharaan	52
Tabel 28	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	53
Tabel 29	Rincian Beban Perjalanan Dinas	54
Tabel 30	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	55
Tabel 31	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	55
Tabel 32	Rincian Kegiatan Non Operasional	56
Tabel 33	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	58
Tabel 34	Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi	59
Tabel 35	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	59
Tabel 36	Rincian Transfer Masuk	60

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

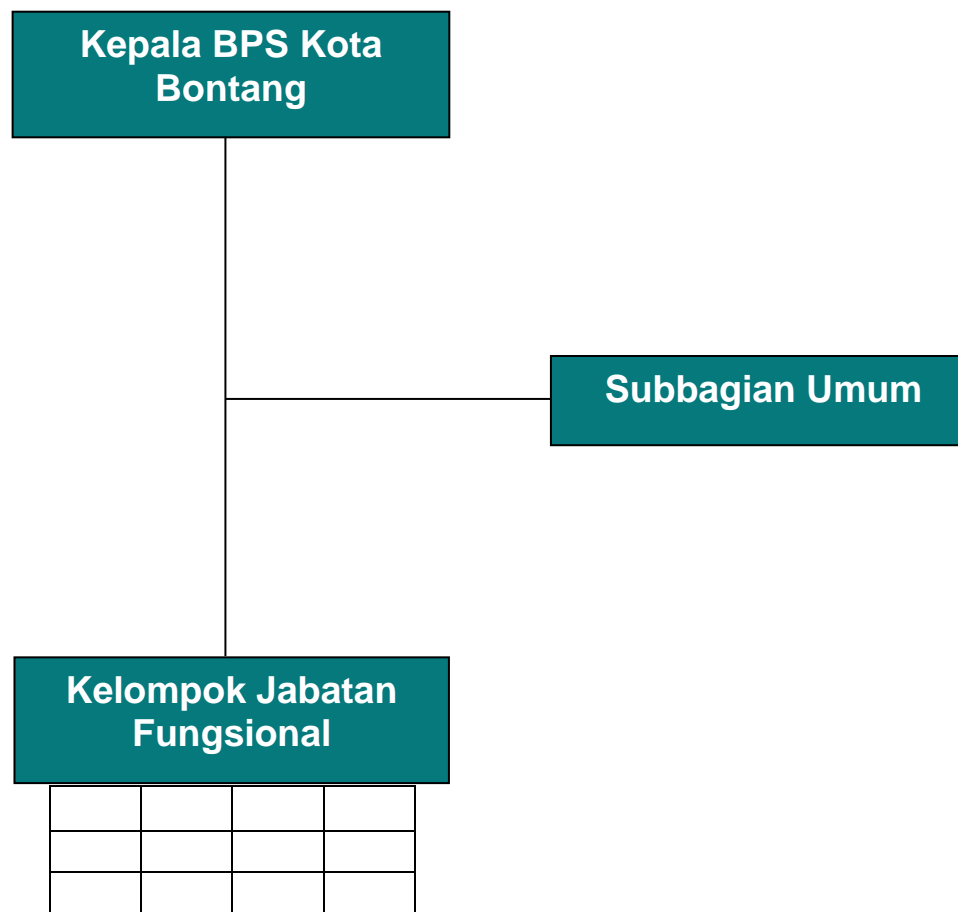
BPS Kota Bontang, 22 Mei 2023  
Kepala,  
  
Widiyantono, S.S.T., M.Stat.  
NIP.197901092000121001



## INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

## STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2022



# LAPORAN CAPAIAN KINERJA POSISI S.D DESEMBER 2022

## LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2022

Periode s.d bulan : 2022-12  
 Kementerian Negara/Lembaga : 054 - BADAN PUSAT STATISTIK  
 Eselon 1 : 054.01 - BADAN PUSAT STATISTIK  
 Wilayah/Provinsi : 16.54 - KOTA BONTANG/KALIMANTAN TIMUR  
 Satuan Kerja : 637237 - BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BONTANG

Halaman : 1  
 Tanggal Cetak : 25-01-2023

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	7,304,192,000.00	7,281,529,119.00	99.69%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	7,304,192,000.00	7,281,529,119.00	99.69%							
GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	3,612,343,000.00	3,597,631,210.00	99.59%							
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	24,762,000.00	24,749,447.00	99.95%							
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,832,000.00	1,831,944.00	100%							
003	LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	1,832,000.00	1,831,944.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
BMA	Data dan Informasi Publik	22,930,000.00	22,917,503.00	99.95%							
004	LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK	22,930,000.00	22,917,503.00	99.95%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.05%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	33,365,000.00	33,362,054.00	99.99%							
BMA	Data dan Informasi Publik	33,365,000.00	33,362,054.00	99.99%							
007	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN	33,365,000.00	33,362,054.00	99.99%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.01%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	16,667,000.00	16,657,604.00	99.94%							
BMA	Data dan Informasi Publik	16,667,000.00	16,657,604.00	99.94%							
006	PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI	16,667,000.00	16,657,604.00	99.94%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.055%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	540,000.00	538,239.00	99.67%							
BMA	Data dan Informasi Publik	540,000.00	538,239.00	99.67%							
005	DOKUMEN, LAPORAN, DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI	540,000.00	538,239.00	99.67%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.33%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	13,945,000.00	13,944,005.00	99.99%							
BMA	Data dan Informasi Publik	13,945,000.00	13,944,005.00	99.99%							
004	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI	13,945,000.00	13,944,005.00	99.99%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.005%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	26,396,000.00	26,394,321.00	99.99%							
BMA	Data dan Informasi Publik	26,396,000.00	26,394,321.00	99.99%							
009	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA	26,396,000.00	26,394,321.00	99.99%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.005%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	70,449,000.00	70,440,668.00	99.99%							
BMA	Data dan Informasi Publik	70,449,000.00	70,440,668.00	99.99%							
006	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI	70,449,000.00	70,440,668.00	99.99%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.005%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	987,305,000.00	986,934,922.00	99.96%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
BMA	Data dan Informasi Publik	129,955,000.00	129,904,463.00	99.96%							
004	PUBLIKASI/LAPORAN SAKERNAS	129,955,000.00	129,904,463.00	99.96%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.035%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
QMA	Data dan Informasi Publik	857,350,000.00	857,030,459.00	99.96%							
006	PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PENDUDUK	857,350,000.00	857,030,459.00	99.96%	1.0000	Publikasi	1.0000	99.995%	0.035%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	219,808,000.00	219,683,600.00	99.94%							
BMA	Data dan Informasi Publik	219,808,000.00	219,683,600.00	99.94%							
006	PUBLIKASI/LAPORAN SUSENAS	219,808,000.00	219,683,600.00	99.94%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.055%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	1,927,043,000.00	1,913,110,466.00	99.28%							
BMA	Data dan Informasi Publik	3,920,000.00	1,097,861.00	28.01%							
006	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL	1,100,000.00	1,097,861.00	99.81%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.19%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
008	PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN PODES	2,820,000.00	0.00	0%	1.0000	Layanan	1.0000	99.99%	99.99%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Seluruh sisa anggaran pada 2907.BMA.008 - PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN PODES terkena Automatic Adjustment (AA) dan Kegiatan Pendataan PODES dibatalkan
QMA	Data dan Informasi Publik	1,923,123,000.00	1,912,012,605.00	99.42%							
009	Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi	1,923,123,000.00	1,912,012,605.00	99.42%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.58%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	40,988,000.00	40,939,925.00	99.88%							
BMA	Data dan Informasi Publik	28,263,000.00	28,241,687.00	99.92%							
004	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA	28,263,000.00	28,241,687.00	99.92%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.08%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
QMA	Data dan Informasi Publik	12,725,000.00	12,698,238.00	99.79%							
009	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK E-COMMERCE	12,725,000.00	12,698,238.00	99.79%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.205%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	22,279,000.00	22,241,094.00	99.83%							
BMA	Data dan Informasi Publik	22,279,000.00	22,241,094.00	99.83%							
005	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG TERBIT TEPAT WAKTU	22,279,000.00	22,241,094.00	99.83%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.165%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	228,796,000.00	228,634,865.00	99.93%							
BMA	Data dan Informasi Publik	4,648,000.00	4,638,682.00	99.8%							
008	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	4,648,000.00	4,638,682.00	99.8%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.195%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
QMA	Data dan Informasi Publik	224,148,000.00	223,996,183.00	99.93%							
006	PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PERTANIAN	186,139,000.00	186,050,497.00	99.95%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.045%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
007	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN	20,908,000.00	20,896,077.00	99.94%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.06%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
010	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA	17,101,000.00	17,049,609.00	99.7%	1.0000	Layanan	1.0000	99.995%	0.295%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
WA	Program Dukungan Manajemen	3,691,849,000.00	3,683,897,909.00	99.78%							
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	3,691,849,000.00	3,683,897,909.00	99.78%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,662,940,000.00	3,655,399,860.00	99.79%							
956	Layanan BMN	900,000.00	888,000.00	98.67%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	1.33%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
962	Layanan Umum	4,080,000.00	4,020,000.00	98.53%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	1.47%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
994	Layanan Perkantoran	3,657,960,000.00	3,650,491,880.00	99.8%	2.0000	Layanan	2.0000	100%	0.2%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
<b>EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>995,000.00</b>	<b>99.5%</b>							
954	Layanan Manajemen SDM	1,000,000.00	995,000.00	99.5%	20.0000	Orang	20.0000	99.995%	0.495%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
<b>EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>27,909,000.00</b>	<b>27,503,029.00</b>	<b>98.55%</b>							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9,487,000.00	9,123,029.00	96.16%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	3.84%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
955	Layanan Manajemen Keuangan	14,372,000.00	14,360,000.00	99.92%	3.0000	Dokumen	3.0000	99.995%	0.075%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan
961	Layanan Reformasi Kinerja	4,050,000.00	4,020,000.00	99.26%	1.0000	Dokumen	1.0000	99.995%	0.735%	( 00 )	Kegiatan Telah Dilaksanakan

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp17.041.644 atau mencapai 886,66 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.922.000.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.267.458.416 atau mencapai 99,50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.304.192.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.774.450.869 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp123.493.338 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.647.745.031 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.212.500.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp104.130.570 dan Rp4.670.320.299.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.921.644, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp7.601.076.195 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp7.599.154.551. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp15.495.240 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp7.583.659.311.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp4.875.904.258 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp7.583.659.311 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.378.075.352 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp4.670.320.299.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BPS Kota Bontang**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022		% terhadap Anggaran	31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.922.000	17.041.644	886,66	5.142.644
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.922.000</b>	<b>17.041.644</b>	<b>886,66</b>	<b>5.142.644</b>
Belanja Negara	B.2	7.304.192.000	7.267.458.416	99,50	4.283.672.559
Belanja Pegawai	B.3	3.077.855.000	3.056.493.129	99,31	2.753.604.263
Belanja Barang	B.4	4.226.337.000	4.210.965.287	99,64	1.435.571.696
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	94.496.600
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>7.304.192.000</b>	<b>7.267.458.416</b>	<b>99,50</b>	<b>4.283.672.559</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**II. NERACA**

**BPS Kota Bontang**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	20.375.898	0
Persediaan	C.2	103.117.440	111.032.459
Jumlah Aset Lancar		123.493.338	111.032.459
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.3	1.504.778.000	1.504.778.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	1.648.571.967	1.628.021.967
Gedung Dan Bangunan	C.5	2.874.089.197	2.874.089.197
Aset Tetap Lainnya	C.6	102.281.121	99.866.871
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1.481.975.254)	(1.247.412.282)
Jumlah Aset Tetap		4.647.745.031	4.859.343.753
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.8	25.700.000	25.700.000
Aset Lain-lain	C.9	0	2.039.010
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.10	(22.487.500)	(16.062.500)
Jumlah Aset Lainnya		3.212.500	11.676.510
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>4.774.450.869</b>	<b>4.982.052.722</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			

Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	104.130.570	106.148.464
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>104.130.570</b>	<b>106.148.464</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.12	4.670.320.299	4.875.904.258
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>4.670.320.299</b>	<b>4.875.904.258</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>4.774.450.869</b>	<b>4.982.052.722</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPS Kota Bontang**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.921.644	1.921.644
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		1.921.644	1.921.644
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	3.054.426.661	2.757.769.179
Beban Persediaan	D.3	269.001.313	105.315.675
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.930.548.662	1.045.693.148
Beban Pemeliharaan	D.5	116.855.963	109.396.810
Beban Perjalanan Dinas	D.6	989.255.624	193.822.841
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	240.987.972	245.552.017
<b>JUMLAH BEBAN</b>		7.601.076.195	4.457.549.670
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		(7.599.154.551)	(4.455.628.026)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		2.039.010	1.181.250
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		17.534.250	218.000
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		15.495.240	2.039.750
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		(7.583.659.311)	(4.453.588.276)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPS Kota Bontang**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas awal	E.1	4.875.904.258	5.004.557.850
Surplus/defisit-LO	E.2	(7.583.659.311)	(4.453.588.276)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	0	19.347.230
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0	2.781.150
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	0	16.566.080
Transaksi Antar Entitas	E.4	7.378.075.352	4.305.587.454
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	7.250.416.772	4.278.529.915
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	127.658.580	27.057.539
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(205.583.959)	(128.653.592)
Ekuitas Akhir	E.5	4.670.320.299	4.875.904.258

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

## Catatan Atas Laporan Keuangan

### Dasar Hukum **A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Covid 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun 2022 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
40. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;
41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; dan
46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;

Entitas dan **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Kota Bontang**  
 Rencana  
 Strategis

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah,

swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: Visi BPS :

**"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"**

*("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")*

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya dengan dukungan dan peranan TIK.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen BPS. Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :
  1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
  2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
  3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
  4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kota Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis  
Akuntansi

### **A.4. Basis Akuntansi**

BPS Kota Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas

untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar  
Pengukuran

#### **A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kota Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan  
Akuntansi

#### **A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-  
LRA

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO      **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Kota Bontang adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja              **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban                **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset                  **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 1*  
*Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang*

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## Aset Tetap **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 2  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 3*  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban **(6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kota Bontang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Tabel 4  
Rincian Anggaran

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.922.000	1.922.000
Pendapatan Lain-Lain	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.922.000</b>	<b>1.922.000</b>
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	2.666.084.000	3.077.855.000
BELANJA BARANG	1.882.366.000	4.226.337.000
BELANJA MODAL	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.548.450.000</b>	<b>7.304.192.000</b>

DIPA Awal BPS Kota Bontang dengan Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 17 November 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 7038-7001-6937-9007 dengan total nilai pagu anggaran Rp 4,548,450,000 (empat milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Per 31 Desember 2022, BPS Kota Bontang telah melakukan 16 kali revisi anggaran sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 dilakukan dalam rangka blokir anggaran Tunjangan Kinerja Satker. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 16 Desember 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 9416-9009-9399-3168. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp 4,548,450,000 (empat milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Revisi ke-2 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran berdasarkan surat PA (Pengguna Anggaran) Nomor :

- B.018/01000/PR.400/01/2002. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 10 Februari 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 3504-8080-6639-2460. Total nilai pagu anggaran berubah dari semula Rp 4,548,450,000 (empat milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 5,130,137,000 (lima milyar seratus tiga puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Revisi ke-3 dilakukan dalam rangka pemutahiran Halaman 3 DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 13 April 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 3504-8080-6639-2460. Total nilai pagu anggaran Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp 5.130.137.000 (lima milyar seratus tiga puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  - d. Revisi ke-4 dilakukan berdasarkan surat SESTAMA No B-258/02000/PR.440/04/2022 dalam rangka rencana penyesuaian kegiatan pada Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Tahun Anggaran 2022. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 27 Mei 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 8703-9614-4961-3898. Total nilai pagu anggaran berubah dari semula Rp 5.130.137.000 (lima milyar seratus tiga puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 5,174,809,000 (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
  - e. Revisi ke-5 dilakukan berdasarkan surat KEPALA BPS No B-186/01000/PR.440/05/2022 dalam rangka Penambahan Automatic Adjustment Belanja Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Mei 2022. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0004-4538-3053-0324. Total nilai pagu anggaran tetap sebesar 5,174,809,000 (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
  - f. Revisi ke-6 dilakukan dalam rangka Pemutahiran Halaman 3 DIPA dan Pemutahiran POK. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 8 Juli 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0004-4538-3053-0324.
  - g. Revisi ke-7 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan pada Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Tahun Anggaran 2022 sesuai surat Sestama Nomor B-501/02000/PR.440/07/2022. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022

- tanggal 11 Agustus 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 0255-1000-1839-6920.
- h. Revisi ke-8 dilakukan dalam rangka penambahan anggaran Kegiatan Pendataan Awal Regsosek Tahun Anggaran 2022 sesuai surat Sestama Nomor B-585/02000/PR.440/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 1936-0866-1243-3900.
  - i. Revisi ke-9 dilakukan dalam rangka membuka Blokir pada anggaran Regsosek. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 1826-2359-1907-0900.
  - j. Revisi ke-10 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran kegiatan Regsosek. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 19 September 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 1826-2359-1907-0900.
  - k. Revisi ke-11 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran Kegiatan Pendataan Awal Regsosek. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 1826-2359-1907-0900.
  - l. Revisi ke-12 dilakukan dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai dan penyesuaian kegiatan tahun 2022. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 2566-1679-4453-0335.
  - m. Revisi ke-13 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran Kegiatan Pendataan Awal Regsosek dan pemenuhan kekurangan belanja pegawai. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 18 November 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 1498-3169-2287-6243.
  - n. Revisi ke-14 dilakukan dalam rangka Realokasi *Automatic Adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai surat No. B-076/64511/PR.440/11/2022. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 9290-7221-8862-0205.
  - o. Revisi ke-15 dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK melalui aplikasi SAKTI. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 9290-7221-8862-0205.

- p. Revisi ke-16 dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK dan pemutakhiran Hal 3 DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan nomor Digital Stamp (DS): 9290-7221-8862-0205.

Rincian setiap Revisi DIPA dijelaskan pada Penjelasan Lainnya.

Adapun penambahan anggaran sampai dengan periode 31 Desember 2022 ini berpengaruh terhadap pencapaian realisasi anggaran dan sasaran capaian kinerja yang ditargetkan pada periode Desember 2022 karena meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

*Realisasi PNBP B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak*  
Rp17.041.644

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.041.644 atau mencapai 886,66 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.922.000. Rincian Pendapatan BPS Kota Bontang sebagai berikut:

*Tabel 5*  
*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.922.000	1.921.644	99,98
Pendapatan Lain-Lain	0	15.120.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.922.000</b>	<b>17.041.644</b>	<b>886,66</b>

Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN terdiri atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.921.644 berupa sewa rumah dinas terhitung 12 bulan per 31 Desember 2022 dan dirinci sebagaimana berikut:

- a. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Januari 2022 sebesar Rp.160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Januari 2022 No. 00001T/637237/2022 tanggal 3 Januari 2022, SP2D No. 220461505000037 tanggal 3 Januari 2022;

- b. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Februari 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Februari 2022 No. 00002T/637237/2022 tanggal 13 Januari 2022, SP2D No. 220461508000051 tanggal 1 Februari 2022;
- c. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Maret 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Maret 2022 No. 00014T/637237/2022 tanggal 14 Februari 2022, SP2D No. 220461508000131 tanggal 1 Maret 2022;
- d. Pendapatan sewa rumah dinas bulan April 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk April 2022 No. 00027T/637237/2022 tanggal 11 Maret 2022, SP2D No. 220461508000192 tanggal 1 April 2022;
- e. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Mei 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Mei 2022 No. 00059T/637237/2022 tanggal 11 April 2022, SP2D No. 220461508000368 tanggal 1 Mei 2022;
- f. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juni 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Juni 2022 No. 00075T/637237/2022 tanggal 13 Mei 2022, SP2D No. 220461508000526 tanggal 1 Juni 2022.
- g. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juli 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Juli 2022 No. 00098T/637237/2022 tanggal 21 Juni 2022, SP2D No. 220461508000627 tanggal 1 Juli 2022.
- h. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Agustus 2022 No. 00137T/637237/2022 tanggal 21 Juli 2022, SP2D No. 220461508000793 tanggal 1 Agustus 2022.
- i. Pendapatan sewa rumah dinas bulan September 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk September 2022 No. 00176T/637237/2022 tanggal 22 Agustus 2022, SP2D No. 220461508000900 tanggal 1 September 2022.
- j. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Oktober 2022 No. 00203T/637237/2022 tanggal 14 September 2022, SP2D No. 220461508001038 tanggal 1 Oktober 2022.
- k. Pendapatan sewa rumah dinas bulan November 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk November 2022 No. 00243T/637237/2022 tanggal 14 Oktober 2022, SP2D No. 220461508001159 tanggal 1 November 2022.
- l. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Desember 2022 sebesar Rp. 160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Desember 2022 No. 00263T/637237/2022 tanggal 10

November 2022, SP2D No. 220461508001222 tanggal 1 Desember 2022.

Sementara, Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp15.120.000 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengembalian kekurangan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 untuk 2 pegawai A.N. Intan Kusuma Negara dan Novana Ari Santi senilai Rp1.080.000.
- b. Pengembalian kekurangan Gaji 13 Tahun 2021 untuk 2 pegawai A.N. Intan Kusuma Negara dan Novana Ari Santi senilai Rp1.080.000.
- c. Pengembalian kekurangan Tunjangan Struktural PNS Tahun 2021 untuk 2 pegawai A.N. Intan Kusuma Negara dan Novana Ari Santi senilai Rp12.960.000.

*Tabel 6*  
*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022(Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2021(Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.921.644	4.924.644	(60,98)
Pendapatan Lain-Lain	15.120.000	218.000	6.835,78
<b>Jumlah</b>	<b>17.041.644</b>	<b>5.142.644</b>	<b>231,38</b>

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 231,38 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2021.

Penurunan persentase terjadi pada realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN yaitu sebesar 60,98 persen dikarenakan adanya perolehan dari lelang barang bongkaran BMN berupa barang inventaris sejumlah 100 unit (kondisi rusak berat) pada bulan Maret 2021 sebesar Rp3.003.000. Sedangkan per Desember 2022 Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN hanya berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung

dan Bangunan berupa sewa rumah dinas bulan Januari-Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.921.644.

Kemudian untuk Pendapatan Lain-Lain mengalami peningkatan karena Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu per Desember 2021 lebih kecil daripada Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu per Desember 2022.

*Realisasi Belanja Negara  
Rp7.267.458.416*

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.267.458.416 atau 99,50 persen dari anggaran belanja sebesar Rp7.304.192.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 7  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022*

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	3.077.855.000	3.056.493.129	99,31
BELANJA BARANG	4.226.337.000	4.210.965.287	99,64
BELANJA MODAL	0	0	0,00
Jumlah Netto	7.304.192.000	7.267.458.416	99,50

Tabel di atas menyajikan anggaran belanja dan realisasi netto menurut belanja selama periode Tahun Anggaran 2022 dengan rincian: anggaran belanja pegawai sebesar Rp3.077.855.000 dengan realisasi Rp3.056.493.129 atau sebesar 99,31 persen; anggaran belanja barang sebesar Rp4.226.337.000 dengan realisasi Rp4.210.965.287 atau sebesar 99,64 persen yang terdiri dari realisasi belanja barang akun khusus COVID-19 sebesar Rp19.914.450, dan realisasi belanja barang akun Non COVID-19 sebesar Rp4.191.050.837.

*Tabel 8  
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	3.070.563.832	2.755.639.913	11,43
BELANJA BARANG	4.210.965.287	1.437.367.696	192,96
BELANJA MODAL	0	94.496.600	(100,00)

Jumlah Bruto	7.281.529.119	4.287.504.209	69,83
Pengembalian Belanja	14.070.703	3.831.650	267,22
Jumlah	7.267.458.416	4.283.672.559	69,65

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 69,65 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2021.

Anggaran Belanja Pegawai pada TA 2022 sebesar Rp3.077.855.000, hingga 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp3.070.563.832 atau 99,76 persen dari pagu anggaran. Realisasi anggaran Belanja Pegawai meningkat sebesar 11,43 persen dibandingkan 31 Desember 2021 antara lain dikarenakan adanya penambahan pegawai serta adanya kegiatan lembur untuk pengecekan kembali SPJ dan dokumen keuangan.

Anggaran Belanja Barang pada TA 2022 sebesar Rp4.226.337.000, hingga 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp4.210.965.287 atau 99,64 persen dari pagu anggaran. Realisasi anggaran Belanja Barang naik sebesar 192,96 persen dibandingkan 31 Desember 2021 secara umum dikarenakan adanya pemberlakuan WFO (*Work From Office*) sebagai tindak lanjut kebijakan *New Normal* di BPS Kota Bontang sehingga kebutuhan akan barang konsumsi meningkat.

Pengembalian belanja pada TA 2022 sebesar Rp14.070.703 berasal dari pengembalian Belanja Pegawai yang terdiri dari pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, dan Belanja Tunjangan Umum PNS. Apabila dibandingkan dengan Desember 2021 pengembalian belanja mengalami peningkatan sebanyak 267,22 persen.

*Belanja Pegawai*  
*Rp3.056.493.129*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.056.493.129 dan Rp2.753.604.263. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 9*  
*Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.486.791.720	1.385.466.243	7,31
Belanja Lembur	127.143.000	131.572.000	(3,37)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.456.629.112	1.238.601.670	17,60
Jumlah Bruto	3.070.563.832	2.755.639.913	11,43
Pengembalian Belanja	14.070.703	2.035.650	591,21
Jumlah	3.056.493.129	2.753.604.263	11,00

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,00 persen dari 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja gaji dan tunjangan PNS per Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 7,31 persen dibandingkan Desember 2021 karena adanya penambahan pegawai masuk dari lulusan Polstat STIS dan perubahan pegawai dari CPNS menjadi PNS.
2. Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito per Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 17,60 persen dibandingkan Desember 2021 dikarenakan adanya penambahan pegawai masuk dari lulusan Polstat STIS dan adanya pegawai yang baru diangkat dalam jabatan fungsional.
3. Pengembalian belanja pegawai per Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 591,21 persen dibandingkan Desember 2021. Pengembalian belanja pada TA 2022 sebesar Rp14.070.703 berasal dari pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp703, Belanja Tunjangan Struktural PNS sebesar Rp12.960.000, dan Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp1.110.000.

*Belanja Barang  
Rp4.210.965.287*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.210.965.287 dan Rp1.435.571.696.

*Tabel 10  
Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
--------	---------------------------------	---------------------------------	----------------

Belanja Barang Operasional	353.998.177	415.307.690	(14,76)
Belanja Barang Non Operasional	2.516.444.236	551.474.375	356,31
Belanja Barang Persediaan	160.909.214	97.204.640	65,54
Belanja Jasa	80.433.573	74.303.340	8,25
Belanja Pemeliharaan	109.924.463	105.254.810	4,44
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	989.255.624	193.822.841	410,39
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>4.210.965.287</b>	<b>1.437.367.696</b>	<b>192,96</b>
Pengembalian Belanja	0	1.796.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>4.210.965.287</b>	<b>1.435.571.696</b>	<b>193,33</b>

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 193,33 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021.

Realisasi belanja barang mengalami peningkatan secara umum karena adanya pemberlakuan WFO (*Work From Office*) sebagai tindak lanjut kebijakan *New Normal* di BPS Kota Bontang sehingga kebutuhan akan barang konsumsi meningkat. Realisasi belanja perjalanan dalam negeri mengalami kenaikan sebesar 410,39 persen. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan seperti pelatihan dan rapat koordinasi yang dilaksanakan *fullboard* di luar kota, serta pelaksanaan konsultasi ke BPS Provinsi Kalimantan Timur. Per Desember 2022 tidak terdapat pengembalian belanja barang.

*Tabel 11.*  
*Realisasi Belanja Barang Akun Khusus COVID-19*  
*Per 31 Desember 2022*

Uraian	2022		% Real Anggaran
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	
521131 (Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID19)	828.000	828.000	100,00
521241 (Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19)	13.615.000	13.596.450	99,86
522192 (Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19)	5.495.000	5.490.000	99,91
<b>Jumlah</b>	<b>19.938.000</b>	<b>19.914.450</b>	<b>99,88</b>

Realisasi belanja menggunakan akun khusus COVID19 adalah sebesar 99,88 persen dari anggaran per 31 Desember 2022. Beberapa rincian terkait belanja menggunakan akun ini dijelaskan sebagai berikut.

- a. Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID19 (521131) dengan anggaran sebesar Rp828.000 telah terealisasi 100 persen per 31 Desember 2022. Akun ini digunakan untuk keperluan belanja layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor) berupa disinfektan dan masker untuk pegawai BPS Kota Bontang.
- b. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) dengan anggaran sebesar Rp13.615.000 telah terealisasi 99,86 persen per 31 Desember 2022. Akun ini digunakan untuk keperluan layanan manajemen belanja masker untuk pegawai BPS Kota Bontang dan APD petugas lapangan Pendataan Awal Regsosek 2022.
- c. Belanja barang Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192) dengan anggaran sebesar Rp5.495.000 telah direalisasikan 99,91 persen untuk keperluan biaya pelaksanaan rapid test COVID-19 pegawai kepada RS Amalia. Akun ini digunakan untuk pelaksanaan *rapid test* dan PCR Covid-19 pegawai BPS Kota Bontang.

*Belanja Modal Rp0* **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp94.496.600. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Tabel 12*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	94.496.600	(100,00)
Jumlah Bruto	0	94.496.600	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	94.496.600	(100,00)

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada 31 Desember 2022 sebesar 100,00 persen dibandingkan 31 Desember 2021 disebabkan oleh

pada TA 2022 tidak dilakukan belanja modal peralatan dan mesin.

#### **B.5.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp94.496.600.

*Tabel 13  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31  
Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian Jenis Belanja</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	94.496.600	(100,00)
Jumlah Bruto	0	94.496.600	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>94.496.600</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2022, mengalami penurunan sebesar 100,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021 sebesar Rp94.496.600.

## C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Belanja Dibayar di Muka Rp20.375.898*

### C.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.375.898 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Tabel 14  
Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021(Rp)</b>
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	20.375.898	0
<b>Jumlah</b>	<b>20.375.898</b>	<b>0</b>

Belanja barang yang dibayar di muka pada TA 2022 meliputi:

1. Belanja langganan listrik sebesar 1219,99 kWh senilai Rp2.074.543 berupa sisa token listrik.
2. Belanja sewa sejumlah Rp18.301.355 berupa sewa gudang untuk periode 1 Januari s.d. 30 November 2023. Biaya sewa gudang senilai Rp20.000.000 sesuai SPK No. 1343/PPK/BPS-BONTANG/11/2022 tanggal 30 November 2022, BAST 1345/PPK/BPS-BONTANG/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 Jangka waktu 365 hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 s.d. 30 November 2023.

*Persediaan Rp103.117.440*

### C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp103.117.440 dan Rp111.032.459. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15*  
*Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Barang Konsumsi	101.917.440	109.116.459
Bahan untuk Pemeliharaan	1.200.000	1.916.000
<b>Jumlah</b>	<b>103.117.440</b>	<b>111.032.459</b>

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2022 dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021</b>	<b>111.032.459</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Pembelian	160.909.214
Transfer Masuk	107.108.580
Hasil Opname Fisik	5.280.000
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>273.297.794</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Habis Pakai	(281.212.813)
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>(281.212.813)</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>(7.915.019)</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>103.117.440</b>

Mutasi penambahan persediaan terdiri dari Pembelian, Transfer Masuk, dan Hasil Opname Fisik. Pembelian Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp160.909.214 terdiri atas pembelian barang konsumsi sebesar Rp154.693.714 dan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp6.215.500. Hasil opname fisik senilai Rp5.280.000 berupa 4800 set Kueisoner K Regsosek 2022 dengan No BAST. BA-002/64741/PL.521/12/2022 tanggal 31 Desember 2022.

Sementara, Transfer Masuk sebesar Rp107.108.580 merupakan transfer barang persediaan dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa:

1. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-30/64512/PL.613/3/2022 Tanggal 1 Maret 2022 yang terdiri dari Kalender Dinding BPS 2022 sebanyak 34 set,

Kalender meja BPS 2022 sebanyak 16 set, dan Buku Kerja 2022 sebanyak 10 set.

2. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-160/64512/PL.613/4/2022 Tanggal 12 April 2022 yang terdiri dari Tas petugas SP2020 sebanyak 133 unit.
3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-172/64512/PL.613/4/2022 Tanggal 14 April 2022 yang terdiri dari Buku 2A, Pedoman Koordinator Sensus Kecamatan Wilayah PAPI sebanyak 8 set, Buku 3A, Pedoman Koordinator Tim Wilayah PAPI sebanyak 22 set, Buku 4A, Pedoman Petugas Pendataan Lapangan Wilayah PAPI sebanyak 96 set, Buku 5, Pedoman Pengkodean sebanyak 22 set, serta Kuesioner SP2020-C2, Kuesioner SP2020-RC2, dan Kuesioner SP2020-V masing-masing sebanyak 96 set.
4. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-181/64512/PL.613/4/2022 Tanggal 28 April 2022 yang terdiri dari Kuesioner SP2020-C2 sebanyak 5504 Set, Kuesioner SP2020-RC2 sebanyak 327 Set, Kuesioner SP2020-V sebanyak 327 Set, Box kecil SP2020 sebanyak 344 unit, Box besar 2 SP2020 sebanyak 18 unit.
5. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-235/64512/PL.714/08/2022 Tanggal 4 Agustus 2022 yang terdiri dari Kuesioner Sakernas SAK.AGS22.AK sebanyak 628 tiras, Buku Pedoman Pencacah sebanyak 30 tiras, Buku Pedoman Pemeriksa sebanyak 10 tiras, dan Buku Kode sebanyak 10 tiras.
6. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-245/64512/PL.714/08/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 yang terdiri dari Kuesioner Susenas VSEN22.MKP sebanyak 156 tiras, Kuesioner Susenas VSEN22.KP sebanyak 156 tiras, Buku 1: Specity Needs Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 2022 sebanyak 2 tiras, Buku 2: Manajemen Pelaksanaan Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 2022 sebanyak 2 tiras, Buku 3: Manajemen Lapangan Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 2022 sebanyak 15 tiras, Buku 4: Konsep dan Definisi Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 2022 sebanyak 15 tiras, Buku 5: Booklet Key Card Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 2022 sebanyak 15 tiras, Contoh VSEN22.DSBS sebanyak 13 tiras, Contoh VSEN22.MHU sebanyak 13 tiras, Contoh VSEN22.DSRT sebanyak 13 tiras, Contoh VSEN22.P sebanyak 13 tiras.
7. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-308/64512/PL.714/08/2022 Tanggal 3 Agustus 2022 yang terdiri dari Pedoman Survei Neraca Terintegrasi (SINASI) 2022 sebanyak 6 tiras dan Kuesioner Survei Neraca Terintegrasi (SINASI) 2022 sebanyak 44 tiras.
8. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-298/64512/PL.714/08/2022 Tanggal 2 Agustus 2022 yang terdiri dari Buku Pedoman SKTNP Barang 2022

sebanyak 3 tiras dan Buku Pedoman SKTNP Jasa 2022 sebanyak 6 tiras.

9. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-259/64512/PL.714/08/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 yang terdiri dari Kuesioner Survei Konstruksi Tahunan SKTH 2022 sebanyak 99 tiras, Kuesioner Survei Konstruksi Triwulanan SKTR 2022 sebanyak 48 tiras, dan Surat Pengantar Survei Konstruksi (2) sebanyak 55 tiras.
10. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-399/64512/PL.714/12/2022 Tanggal 19 Desember 2022 yang terdiri dari Daftar SP-Lahan, SP-Alsintan TP, SP-Benih TP 2022 sebanyak 5 buku, Rekap Kab/Kota SP Tanaman Pangan 2022 sebanyak 1 buku, Daftar SUB - S Survei Ubinan 2022 sebanyak 82 set, dan Daftar SP-Palawija 2022 sebanyak 5 buku.
11. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-423/64512/PL.714/12/2022 Tanggal 26 Desember 2022 yang terdiri dari Pedoman Pencacahan Survei Harga Produsen (HP) 2023 sebanyak 2 tiras, Pedoman Pemeriksaan Survei Harga Produsen (HP) 2023 sebanyak 1 tiras, Pedoman Pencacahan Survei Harga Perdagangan Internasional (HPI) 2023 sebanyak 2 tiras, Pedoman Pemeriksaan Survei Harga Perdagangan Internasional (HPI) 2023 sebanyak 1 tiras, Kuesioner HP 2023 sebanyak 61 tiras, Kuesioner HP-JP 2023 sebanyak 13 tiras, Suplemen Survei Harga Produsen 2023 sebanyak 7 tiras, dan Kuesioner SHPI 2023 sebanyak 25 tiras.
12. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-433/64512/PL.714/12/2022 Tanggal 27 Desember 2022 yang terdiri dari Kalender Dinding BPS 2023 sebanyak 35 buah, Kalender Meja BPS 2023 sebanyak 24 buah, dan Buku Kerja BPS 2023 sebanyak 24 buah.
13. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-463/64512/PL.714/12/2022 Tanggal 29 Desember 2022 yang terdiri dari Kuesioner ST2023-L2.UTP sebanyak 9733 set, Kuesioner ST2023-L2.UTL sebanyak 14 set, Buku Pedoman 2.a2 ST2023-UTP (PAPI) sebanyak 133 tiras, dan Buku Pedoman 3.a2 ST2023-UTP (PAPI) sebanyak 22 tiras.
14. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-443/64512/PL.714/12/2022 Tanggal 29 Desember 2022 yang terdiri dari Standing Banner ST2023 Tanaman Pangan sebanyak 1 set, Standing Banner ST2023 Perikanan sebanyak 1 set, Standing Banner ST2023 Perkebunan sebanyak 1 set, Standing Banner ST2023 Petugas sebanyak 1 set, Baliho ST2023 Peternakan sebanyak 1 set, Baliho ST2023 Perikanan sebanyak 1 set, Poster ST2023 Tanaman Pangan sebanyak 20 set, Poster ST2023 Perikanan sebanyak 13 set, Poster ST2023 Perkebunan sebanyak 8 set, Poster ST2023 Peternakan sebanyak 15 set, Spanduk ST2023 Tanaman Pangan sebanyak 1 set, Spanduk ST2023 Hortikultura sebanyak 1 set, Spanduk ST2023 Perkebunan sebanyak 1 set,

Spanduk ST2023 Peternakan sebanyak 1 set, Spanduk ST2023 Perikanan sebanyak 1 set, Leaflet ST2023 sebanyak 110 set, Kaos ST2023 sebanyak 32 set, Payung ST2023 sebanyak 32 set, dan Topi ST2023 sebanyak 179 set.

15. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-453/64512/PL.714/12/2022 Tanggal 29 Desember 2022 yang terdiri dari Pensil ST2023 sebanyak 147 set, Block Note ST2023 sebanyak 147 buah, Peruncing Pensil ST2023 sebanyak 147 buah, Pulpen ST2023 sebanyak 147 buah, Penghapus Pensil ST2023 sebanyak 147 buah, Papan LJK Clipboard sebanyak 147 buah, Tas ST2023 sebanyak 147 buah, dan Name Tag + Tali ST2023 sebanyak 147 buah.

Sedangkan mutasi pengurangan persediaan terdiri dari Pemakaian senilai Rp281.212.813. Seluruh barang persediaan dalam kondisi baik dan digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Tanah*  
*Rp1.504.778.000*

### C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.504.778.000 dan Rp1.504.778.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021</b>	<b>1.504.778.000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>0</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>1.504.778.000</b>

Tanah bangunan rumah negara Gol. I seluas 271 m<sup>2</sup> senilai Rp 129.000.000 yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pada tanggal pelaporan dikuasai/ digunakan untuk rumah dinas Kepala BPS Kota Bontang dengan sertifikat Nomor 16.08.01.02.4.00038 atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pusat Statistik.

Tanah Kantor seluas 796 m<sup>2</sup> senilai Rp 292.237.000 yang terletak di Jalan Awang Long, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, bersumber dari pembelian dengan sertifikat Nomor

16.08.01.02.4.00039 atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pusat Statistik.

Tanah bangunan rumah dan tanah kantor tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Peralatan dan Mesin* **C.4 Peralatan dan Mesin**  
*Rp1.648.571.967*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp1.648.571.967 dan Rp1.628.021.967. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021</b>	<b>1.628.021.967</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Transfer Masuk	<u>20.550.000</u>
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>20.550.000</b>
<b>:</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<u>0</u>
<b>:</b>	
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>20.550.000</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>1.648.571.967</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022</b>	<b>(1.316.718.124)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022</b>	<b>331.853.843</b>

Selama TA 2022 terdapat mutasi penambahan berupa transfer masuk 1 (satu) unit Printer (Peralatan Personal Komputer) Merk Epson / EcoTank L15160 senilai Rp20.550.000 dengan No BAST.B-388/64512/PL.714/BASTP.BMN/12/2022 Pada tanggal 15 Desember 2022.

Tidak terdapat mutasi pengurangan selama TA 2022. Peralatan dan Mesin tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp2.874.089.197*

#### **C.5 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.874.089.197 dan Rp2.874.089.197. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021</b>	<b>2.874.089.197</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>0</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>2.874.089.197</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022</b>	<b>(165.257.130)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022</b>	<b>2.708.832.067</b>

Gedung dan Bangunan terdiri dari: Bagunan Gedung Tempat Kerja senilai Rp 2.574.717.197; Bangunan Gedung Tempat Tinggal senilai Rp 208.480.000; dan Tugu/Tanda Batas senilai Rp 90.892.000. Gedung dan Bangunan tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Aset Tetap Lainnya  
Rp102.281.121*

#### **C.6 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp102.281.121 dan Rp99.866.871. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021</b>	<b>99.866.871</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Perolehan Lainnya	2.414.250

<b>Total Mutasi Tambah</b>	<u>2.414.250</u>
<b>:</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<u>0</u>
<b>:</b>	
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<u>2.414.250</u>
<b>Saldo Nilai Perolehan</b>	<b>102.281.121</b>
<b>31 Desember 2022</b>	
<b>Akumulasi</b>	
<b>Penyusutan sampai</b>	<b>0</b>
<b>dengan 31 Desember</b>	
<b>2022</b>	
<b>Nilai Buku sampai</b>	
<b>dengan 31 Desember</b>	<b>102.281.121</b>
<b>2022</b>	

Aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak senilai Rp102.281.121. Pada TA 2022 terdapat mutasi tambah berupa 13 unit Serial Lainnya senilai Rp2.414.250 berupa publikasi yang akan diinput sebagai koleksi perpustakaan, yaitu:

- a. Publikasi Kota Bontang Dalam Angka 2022 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp399.600;
  - b. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp199.800;
  - c. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Menurut Pengeluaran 2017-2021 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp138.750;
  - d. Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang 2021 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp 116.550;
  - e. Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Kota Bontang 2021 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp127.650;
  - f. Publikasi Statistik Daerah Kota Bontang 2022 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp188.700;
  - g. Publikasi Kecamatan Bontang Utara Dalam Angka 2022 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp155.400;
  - h. Publikasi Kecamatan Bontang Barat Dalam Angka 2022 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp155.400;
  - i. Publikasi Kecamatan Bontang Selatan Dalam Angka 2022 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp155.400;
10. Publikasi Indikator Ekonomi Kota Bontang 2021 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp155.400;
  11. Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Bontang 2022 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp249.750;

12. Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2022 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp172.050;
13. Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2022 sebanyak 1 (satu) buku senilai Rp199.800;

Aset tetap lainnya tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp1.481.975.254*

#### **C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp1.481.975.254 dan Rp1.247.412.282. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 16  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022*

<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Nilai Buku</b>
Peralatan dan Mesin	1.648.571.967	1.316.718.124	331.853.843
Gedung dan Bangunan	2.874.089.197	165.257.130	2.708.832.067
Aset Tetap Lainnya	102.281.121	0	102.281.121
<b>Jumlah</b>	<b>4.624.942.285</b>	<b>1.481.975.254</b>	<b>3.142.967.031</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp4.624.942.285 mengalami penyusutan sebesar Rp1.481.975.254 sampai dengan 31 Desember 2022 sehingga Nilai Buku Aset Tetap sampai dengan periode tersebut senilai Rp3.142.967.031.

*Aset Tak Berwujud  
Rp25.700.000*

#### **C.8 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp25.700.000 dan Rp25.700.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi

tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 17*  
*Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2022*

Uraian	Nilai Perolehan
Software	25.700.000
<b>Jumlah</b>	<b>25.700.000</b>

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021</b>	<b>25.700.000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>0</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>25.700.000</b>
<b>Akumulasi Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2022</b>	<b>(22.487.500)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022</b>	<b>3.212.500</b>

Pada aset tidak berwujud, tidak terdapat mutasi penambahan maupun mutasi pengurangan selama TA 2022. Adapun akumulasi amortisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.487.500.

*Aset Lain-lain Rp0*

**C.9 Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp2.039.010. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021</b>	<b>2.039.010</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
<b>:</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(2.039.010)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(2.039.010)</b>
<b>:</b>	
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>(2.039.010)</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>0</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022</b>	<b>0</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022</b>	<b>0</b>

Pada aset lain-lain tidak terdapat mutasi tambah, namun terdapat mutasi kurang sejumlah Rp 2.039.010 yang disebabkan penghapusan BMN berupa aset tetap lainnya yaitu 29 unit monografi, laporan, dan serial lainnya sesuai Surat Kepala BPS Kota Bontang No. B-064/64741/PL.800/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan BMN Berupa Aset Tetap Lainnya dengan Nilai perolehan di bawah Rp 100.000.000,00 per unit. Adapun permohonan ini disetujui dengan tindak lanjut pemusnahan sesuai Surat Balasan dari Sekretaris Utama dengan No. B-514/02500/PL.810/06/2022 tentang Persetujuan Penghapusan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan pada BPS Kota Bontang.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp22.487.500*

#### **C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp22.487.500 dan Rp16.062.500. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 18*  
*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</b>	<b>Nilai Buku</b>
Software	25.700.000	22.487.500	3.212.500
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>25.700.000</b>	<b>22.487.500</b>	<b>3.212.500</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada Pihak Ketiga*  
*Rp104.130.570*

**C.11 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp104.130.570 dan Rp106.148.464. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Kota Bontang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel 19*  
*Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2022 dan 2021*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	102.819.231	104.885.699
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.311.339	1.262.765
<b>Jumlah</b>	<b>104.130.570</b>	<b>106.148.464</b>

Rincian utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022 sebesar Rp102.819.231.
- b. Pembayaran belanja barang berupa Langganan Internet Bulan Desember 2022 sebesar Rp1.033.357, Langganan Air Bulan Desember 2022 sebesar Rp243.625, Langganan Telepon Bulan Desember 2022 sebesar Rp34.357.

*Ekuitas*  
*Rp4.670.320.299*

#### **C.12 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.670.320.299 dan Rp4.875.904.258. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP  
Rp1.921.644*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.921.644 dan Rp1.921.644. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 20*

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2022 dan  
31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Naik(Turun)%</b>
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.921.644	1.921.644	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.921.644</b>	<b>1.921.644</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp1.921.644 berasal dari sewa rumah dinas pejabat Eselon III yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kota Bontang. Nilai PNBP ini diperoleh dari biaya sewa rumah dinas selama Januari sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp1.921.644. Nilai PNBP Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per 31 Desember 2022 sama dengan per 31 Desember 2021.

*Tabel 21*

*Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Sampai 31 Desember 2022*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai LO</b>	<b>Nilai LRA</b>	<b>Selisih</b>
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.921.644	1.921.644	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.921.644</b>	<b>1.921.644</b>	<b>0</b>

Nilai Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran PNBP Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sama. Sehingga tidak terdapat selisih antara nilai LO dan LRA.

*Beban Pegawai  
Rp3.054.426.661*

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.054.426.661 dan Rp2.757.769.179. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 22*  
*Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Naik(Turun)%</b>
Beban Gaji Pokok PNS	991.949.600	949.329.720	4,49
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.016	16.732	25,60
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49.270.550	47.423.430	3,89
Beban Tunj. Anak PNS	14.206.640	15.606.250	(8,97)
Beban Tunj. Struktural PNS	37.080.000	57.600.000	(35,63)
Beban Tunj. Fungsional PNS	118.620.000	38.940.000	204,62
Beban Tunj. PPh PNS	3.145.849	1.000.663	214,38
Beban Tunj. Beras PNS	50.404.320	50.838.840	(0,85)
Beban Uang Makan PNS	180.824.000	192.034.000	(5,84)
Beban Tunjangan Umum PNS	26.785.000	31.055.000	(13,75)
Beban Uang Lembur	127.143.000	131.572.000	(3,37)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.454.976.686	1.242.352.544	17,11
<b>Jumlah</b>	<b>3.054.426.661</b>	<b>2.757.769.179</b>	<b>10,76</b>

Secara umum, Beban Pegawai per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dibandingkan 31 Desember 2021. Hal ini salah satunya terjadi karena adanya penambahan pegawai mutasi masuk sebanyak dua orang pada bulan Mei 2022 dan adanya pegawai yang memperoleh jabatan fungsional, KGB, dan perubahan pegawai dari CPNS menjadi PNS. Meningkatnya Beban Tunjangan PPh PNS dibandingkan 31 Desember 2021 dikarenakan terdapat kenaikan pajak yang masih harus

dibayar sebagaimana tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 di bulan Desember 2022.

*Tabel 23*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2022*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	991.949.600	992.312.600	(363.000)
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.016	21.238	(222)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49.270.550	49.306.850	(36.300)
Beban Tunj. Anak PNS	14.206.640	14.221.160	(14.520)
Beban Tunj. Struktural PNS	37.080.000	37.080.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	118.620.000	118.620.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	3.145.849	3.145.849	0
Beban Tunj. Beras PNS	50.404.320	50.404.320	0
Beban Uang Makan PNS	180.824.000	180.824.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	26.785.000	26.785.000	0
Beban Uang Lembur	127.143.000	127.143.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.454.976.686	1.456.629.112	(1.652.426)
<b>Jumlah</b>	<b>3.054.426.661</b>	<b>3.056.493.129</b>	<b>(2.066.468)</b>

Berikut merupakan rincian penyebab selisih nilai LO dan LRA Beban Pegawai per 31 Desember 2022:

- Selisih Beban Gaji Pokok PNS sebesar Rp 363.000,- karena adanya Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai A.n Totok Arianto bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021 dengan Beban Gaji Pokok PNS sebesar (Rp 363.000,-).
- Selisih Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar (Rp222,-) karena adanya Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai A.n Totok Arianto bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021 dengan Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar (Rp 222,-).
- Selisih Beban Tunj. Suami/Istri PNS sebesar (Rp 36.300,-) karena adanya Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai A.N Totok Arianto bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021 dengan Beban Tunj. Suami/Istri PNS sebesar (Rp 36.300,-).
- Selisih Beban Tunj. Anak PNS sebesar (Rp 14.520,-) karena adanya Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai A.N

Totok Arianto bulan Oktober 2021 s.d Desember 2021 dengan Beban Tunj. Anak PNS sebesar (Rp 14.520,-).

Selisih Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar (Rp1.652.426) merupakan selisih Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2021 yang dibayarkan bulan Januari 2022 senilai (Rp104.471.657) dengan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 senilai Rp102.819.231.

*Beban Persediaan  
Rp269.001.313*

#### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp269.001.313 dan Rp105.315.675. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 24  
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	269.001.313	105.315.675	155,42
Jumlah	269.001.313	105.315.675	155,42

Beban Persediaan Konsumsi pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar 155,42 persen. Hal ini menunjukkan kebutuhan penggunaan persediaan meningkat diakibatkan adanya pelaksanaan WFO (*Work From Office*).

*Beban Barang dan Jasa  
Rp2.930.548.662*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.930.548.662 dan Rp1.045.693.148. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Tabel 25*  
*Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	266.508.464	316.012.630	(15,67)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	391.000	1.278.150	(69,41)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86.280.000	86.280.000	0,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	828.000	11.736.910	(92,95)
Beban Bahan	319.723.546	73.773.375	333,39
Beban Honor Output Kegiatan	2.143.113.000	449.205.000	377,09
Beban Barang Non Operasional Lainnya	12.794.040	0	0,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13.596.450	26.700.000	(49,08)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.995.000	0	0,00
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	22.222.200	0	0,00
Beban Langganan Listrik	43.964.207	34.071.500	29,04
Beban Langganan Telepon	421.710	408.840	3,15
Beban Langganan Air	3.254.400	2.370.125	37,31
Beban Sewa	1.698.645	6.246.618	(72,81)
Beban Jasa Profesi	2.900.000	900.000	222,22
Beban Jasa Lainnya	2.368.000	1.620.000	46,17
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.490.000	35.090.000	(84,35)
<b>Jumlah</b>	<b>2.930.548.662</b>	<b>1.045.693.148</b>	<b>180,25</b>

Secara umum, Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi per 31 Desember 2021. Hal ini dikarenakan penerapan WFO (*Work From Office*) yang diterapkan selama fase *New Normal*. Hal ini juga sejalan dengan menurunnya Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 dibandingkan Desember 2021. BPS Kota Bontang mengurangi belanja barang yang berkaitan dengan *Covid-19* seperti pembelian APD untuk petugas.

*Tabel 26*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2022*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	266.508.464	266.499.177	9.287
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	391.000	391.000	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86.280.000	86.280.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	828.000	828.000	0
Beban Bahan	319.723.546	319.723.546	0
Beban Honor Output Kegiatan	2.143.113.000	2.143.113.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	12.794.040	12.794.040	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13.596.450	13.596.450	0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.995.000	4.995.000	0
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	22.222.200	22.222.200	0
Beban Langganan Listrik	43.964.207	46.038.750	(2.074.543)
Beban Langganan Telepon	421.710	421.423	287
Beban Langganan Air	3.254.400	3.215.400	39.000
Beban Sewa	1.698.645	20.000.000	(18.301.355)
Beban Jasa Profesi	2.900.000	2.900.000	0
Beban Jasa Lainnya	2.368.000	2.368.000	0

Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.490.000	5.490.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.930.548.662</b>	<b>2.950.875.986</b>	<b>(20.327.324)</b>

Penjelasan selisih antara nilai LO dan LRA merupakan selisih akrual belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 dikurangi jurnal balik belanja yang masih harus dibayar tahun 2021 di awal tahun 2022. Adapun selisih terdapat pada:

1. Selisih Beban Keperluan Perkantoran senilai Rp9.287 merupakan selisih beban langganan internet bulan Desember 2021 yang dibayarkan bulan Januari 2022 senilai (Rp024.070) dengan beban langganan internet bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 senilai Rp1.033.357.
2. Selisih Beban Langganan Listrik senilai (Rp074.543) merupakan nilai sisa token listrik per 31 Desember 2022 sebanyak 1219,99 kWh.
3. Selisih Beban Langganan Telepon senilai Rp287 merupakan selisih beban langganan telepon bulan Desember 2021 yang dibayarkan bulan Januari 2022 senilai (Rp34.070) dengan beban langganan telepon bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 senilai Rp34.357.
4. Selisih Beban Langganan Air senilai Rp39.000 merupakan selisih beban langganan air bulan Desember 2021 yang dibayarkan bulan Januari 2022 senilai (Rp 20625) dengan beban langganan air bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 senilai Rp243.625.
5. Selisih Beban Sewa senilai (Rp18.301.355) merupakan nilai sewa gudang yang dibayar di muka per 31 Desember 2022 untuk sisa periode 1 Januari-30 November 2023.

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp116.855.963*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp116.855.963 dan Rp109.396.810. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Tabel 27  
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31  
Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Naik(Turun)%</b>
---------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.106.325	46.555.900	31,25
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	950.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.818.138	57.748.910	(15,46)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.931.500	4.142.000	67,35
<b>Jumlah</b>	<b>116.855.963</b>	<b>109.396.810</b>	<b>6,82</b>

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 meningkat 6,82 persen dibandingkan per 31 Desember 2021. Apabila dilihat pada Tabel 25 dapat diketahui bahwa Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan mengalami peningkatan. Sedangkan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 15,46 persen. Penurunan ini disebabkan oleh BMN yang ada masih dalam kondisi baik dan hanya sedikit BMN dengan kondisi rusak ringan. Pada TA 2022 tidak terdapat Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19.

*Tabel 28*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai LO</b>	<b>Nilai LRA</b>	<b>Selisih</b>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.106.325	61.106.325	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.818.138	48.818.138	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.931.500	0	6.931.500
<b>Jumlah</b>	<b>116.855.963</b>	<b>109.924.463</b>	<b>6.931.500</b>

Beban pemeliharaan senilai Rp6.931.500 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan

untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Pemakaian persediaan untuk pemeliharaan tidak menimbulkan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan karena pencatatan kode barang dalam aplikasi persediaan menggunakan kode barang bahan pemeliharaan tetapi realisasi anggaran belanjanya menggunakan akun belanja persediaan barang konsumsi, bukan belanja pemeliharaan.

*Beban Perjalanan Dinas*  
*Rp989.255.624*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp989.255.624 dan Rp193.822.841. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Tabel 29*  
*Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Naik(Turun)%</b>
Beban Perjalanan Biasa	284.722.274	131.052.841	117,26
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.470.000	62.770.000	4,30
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	627.873.350	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.190.000	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>989.255.624</b>	<b>193.822.841</b>	<b>410,39</b>

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 410,39 persen dibandingkan per 31 Desember 2021 disebabkan karena penerapan *New Normal* sehingga kegiatan sudah bisa dilakukan secara *offline* untuk pelatihan dan kegiatan konsultasi.

*Tabel 30*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai*  
*31 Desember 2022*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	284.722.274	284.722.274	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.470.000	65.470.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	627.873.350	627.873.350	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.190.000	11.190.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>989.255.624</b>	<b>989.255.624</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih antara LO dan LRA untuk rincian beban perjalanan dinas sampai 31 Desember 2022.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi*  
*Rp240.987.972*

#### **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp240.987.972 dan Rp245.552.017. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Tabel 31*  
*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember*  
*2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	176.449.672	181.013.717	(2,52)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.113.300	58.113.300	0,00

Beban Amortisasi Software	6.425.000	6.425.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>240.987.972</b>	<b>245.552.017</b>	<b>(1,86)</b>

Beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan 1,86 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini salah satunya disumbangkan oleh menurunnya beban penyusutan peralatan dan mesin. Sedangkan, untuk nilai beban penyusutan gedung dan bangunan, serta beban amortisasi software konstan.

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp15.495.240*

#### **D.8 Kegiatan Non Operasional**

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 32  
Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>Naik(Turun)%</b>
<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3.003.000	(100,00)
<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	2.039.010	1.181.250	72,61
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	15.120.000	218.000	6.835,78
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	2.414.250	0	0,00
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
<b>Jumlah</b>	<b>15.495.240</b>	<b>2.039.750</b>	<b>659,66</b>

Rincian Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp 2.039.010. Nilai ini merupakan hasil dari usulan penghapusan BMN berupa aset tetap lainnya yaitu 29 unit monografi, laporan, dan serial lainnya

sesuai Surat Kepala BPS Kota Bontang No. B-064/64741/PL.800/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan BMN Berupa Aset Tetap Lainnya dengan Nilai perolehan di bawah Rp 100.000.000,00 per unit. Adapun permohonan ini disetujui dengan tindak lanjut pemusnahan sesuai Surat Balasan dari Sekretaris Utama dengan No. B-514/02500/PL.810/06/2022 tentang Persetujuan Penghapusan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan pada BPS Kota Bontang.

Selain itu, per 31 Desember 2022 terdapat penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp15.120.000.

Per 31 Desember 2022 tidak ada pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya.

## **E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp4.875.904.258*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.875.904.258 dan Rp5.004.557.850.

Nilai Ekuitas Awal tersebut mengalami penurunan pada 1 Januari 2022 apabila dibandingkan dengan 1 Januari 2021.

*Defisit LO*  
*Rp7.583.659.311*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.583.659.311 dan Rp4.453.588.276. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp19.347.230. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

*Tabel 33*  
*Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021(Rp)</b>
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	2.781.150
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	16.566.080
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>19.347.230</b>

Per 31 Desember 2022 tidak terdapat koreksi yang dapat menambah/mengurangi ekuitas. Sehingga, apabila dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 nilai ini jauh lebih kecil. Per 31 Desember 2021 terdapat koreksi yang dapat menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp2.781.150 dan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp16.566.080.

*Koreksi Atas*  
*Reklasifikasi Rp0*

#### **E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.781.150.

*Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi Rp0*

**E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp16.566.080. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Tabel 34  
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022*

<b>Tabel Jenis Aset Tetap</b>	<b>Tabel Nilai Koreksi(Rp)</b>
Jumlah	0

\*) nilai minus pada tabel didefinisikan koreksi pada aset tersebut merupakan koreksi pengurangan

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp7.378.075.352*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.378.075.352 dan Rp4.305.587.454. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Tabel 35  
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021(Rp)</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.267.458.416	4.283.672.559
Diterima dari Entitas Lain	(17.041.644)	(5.142.644)
Transfer Masuk	127.658.580	27.057.539
<b>Jumlah</b>	<b>7.378.075.352</b>	<b>4.305.587.454</b>

Transaksi yang ditagihkan ke entitas lain senilai Rp7.267.458.416 merupakan realisasi anggaran yang diajukan ke KPPN Samarinda s.d. 31 Desember 2022. Transaksi yang diterima dari entitas lain sebesar Rp17.041.644 terdiri atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan

Bangunan berupa sewa rumah dinas terhitung 12 bulan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.921.644 dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2022 sebesar Rp 15.120.000. Sedangkan Transfer Masuk senilai Rp127.658.580 terdiri atas barang konsumsi senilai Rp107.108.580 serta peralatan dan mesin senilai Rp20.550.000.

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar minus Rp17.041.644 sedangkan DKEL sebesar Rp7.267.458.416.

Nilai Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp17.041.644 merupakan jumlah pendapatan dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.921.644 berupa sewa rumah dinas terhitung 12 bulan per 31 Desember 2022 dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2022 sebesar Rp 15.120.000.

Nilai Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp7.267.458.416. berasal dari realisasi belanja hingga 31 Desember 2022 dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp3.056.493.129 dan realisasi Belanja Barang Rp4.210.965.287.

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp127.658.580. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

*Tabel 36  
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2022*

<b>Entitas Asal</b>	<b>Jenis</b>	<b>Aset Diterima</b>	<b>Akumulasi Transaksional</b>	<b>Nilai Buku Aset (Rp)</b>
BPS				
Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	127.658.580	0	127.658.580
<b>Jumlah</b>		<b>127.658.580</b>	<b>0</b>	<b>127.658.580</b>

Transfer Masuk dari BPS Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp127.658.580 terdiri atas barang konsumsi senilai Rp107.108.580

dan aset tetap peralatan dan mesin berupa 1 unit printer senilai Rp20.550.000.

Barang konsumsi yang diterima dirincikan sebagai berikut:

- a. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor senilai Rp1.529.440 berupa Kalender Dinding sebanyak 34 set, Kalender meja sebanyak 16 set, dan Buku kerja sebanyak 10 set;
- b. Barang Persediaan Pelatihan Petugas *Long Form* Sensus Penduduk 2020 senilai Rp13.781.600;
- c. Tas petugas SP2020 senilai Rp5.768.900;
- d. Barang Persediaan Kuesioner Kegiatan Long Form Sensus Penduduk 2020 senilai Rp27.726.667;
- e. Barang Persediaan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022 senilai Rp14.423.600;
- f. Barang Persediaan Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2022 senilai Rp8.984.100;
- g. Barang Persediaan Survei Neraca Terintegrasi 2022 senilai Rp717.000;
- h. Barang Persediaan Buku Pedoman SKTNP Jasa 2022 dan SKTNP Barang 2022 senilai Rp282.000;
- i. Barang Persediaan Survei Konstruksi Tahunan dan Triwulanan 2022 senilai Rp254.342;
- j. Barang Persediaan Survei Pertanian Tanaman Pangan 2022 senilai Rp172.605;
- k. Barang Persediaan Survei Harga Produsen 2023 dan Survei Harga Perdagangan Internasional 2023 senilai Rp562.000;
- l. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor senilai Rp2.139.266 berupa Kalender Dinding BPS 2023 sebanyak 35 buah, Kalender Meja BPS 2023 sebanyak 24 buah, dan Buku Kerja BPS 2023 sebanyak 24 buah;
- m. Barang Persediaan Sensus Pertanian 2023 senilai Rp12.702.060; Barang Persediaan Publisitas Sensus Pertanian 2023 senilai Rp13.655.000; dan
- n. Barang Persediaan ATK Sensus Pertanian 2023 senilai Rp4.410.000.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp4.670.320.299*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.670.320.299 dan Rp4.875.904.258.

## F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 096-6474-2021 Tentang Pengelola Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021, pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2022 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran	: Widiyantono, SST., M.Stat.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Fathul Jannah, S.E., M.Si.
Bendahara	: Tania Viona Sirait, S.Tr.Stat.
Pengurus/ Penyimpan BMN	: Octarina Nuria Salsabila, S.Tr.Stat.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 089/6474/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 096/6474/2021 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 tanggal 26 September 2022, ditetapkan penggantian Pengurus/ Penyimpan BMN. Per 1 Oktober 2022 pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2022 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran	: Widiyantono, SST., M.Stat.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Fathul Jannah, S.E., M.Si.
Bendahara	: Tania Viona Sirait, S.Tr.Stat.
Pengurus/ Penyimpan BMN	: Diah Rukmana Sari, S.Tr.Stat.

2. BPS Kota Bontang memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran BPG 046 BPS KOTA BONTANG di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK – KC BONTANG dengan nomor rekening 8100126372371000 berdasarkan persetujuan rekening dari KPPN Samarinda No. S-430/PB.3/2021 tanggal 17 Maret 2021.
3. Penyusunan Laporan Keuangan TA Anggaran 2022 BPS Kota Bontang ini mengikuti kebijakan akuntansi sesuai PMK Nomor 215/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yaitu memperoleh keandalan laporan keuangan perlu didukung dengan rekonsiliasi dengan menerapkan SAKTI *full module*. Adapun kebijakan ini menyebabkan perubahan-perubahan sebagai berikut:
  - Aplikasi e-Rekon tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal maupun eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
  - Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan satker dan rekonsiliasi antar modul pada Modul Pelaporan SAKTI, yang dapat dimonitor melalui Aplikasi MonSAKTI.

- Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data anggaran, realisasi, kas, dan hibah pada SPAN (Sistem Akuntansi Pusat/SiAP pada BUN) dengan SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi/SAI pada K/L) melalui Aplikasi MonSAKTI.
  - Data SPAN dan SAKTI secara periodik akan ter-push ke Aplikasi MonSAKTI secara otomatis (tidak melalui proses upload data).
  - Sesuai ketentuan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) dihasilkan melalui Aplikasi SAKTI. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dapat menggunakan Aplikasi MonSAKTI untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.
4. Berikut merupakan rincian pengungkapan lainnya di BPS Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2022 (Januari-Desember 2022):
- BPS Kota Bontang tidak memiliki kerjasama dari pihak lain;
  - BPS Kota Bontang Tidak memiliki rekening bendahara penerimaan;
  - Tidak terdapat rincian kas lainnya atau setara kas;
  - Tidak terdapat rincian uang muka belanja dan pendapatan yang masih harus diterima;
  - Tidak terdapat rincian mengenai jalan, irigasi, dan jaringan;
  - Tidak terdapat rincian mengenai konstruksi dalam pengerjaan;
  - Tidak terdapat rincian mengenai pendapatan yang ditangguhkan;
  - Tidak terdapat rincian mengenai pendapatan diterima di muka;
  - Tidak terdapat rincian mengenai belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat;
  - Tidak memiliki pos luar biasa;
  - Tidak terdapat Penyesuaian nilai tahun berjalan;
  - Tidak terdapat Koreksi nilai persediaan;
  - Tidak terdapat koreksi nilai aset tetap non revaluasi;
  - Tidak terdapat koreksi atas beban;
  - Tidak terdapat koreksi atas pendapatan;
  - Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca;
  - Tidak terdapat tindak lanjut pemeriksaan BPK;
5. DIPA Awal BPS Kota Bontang dengan Nomor: SP DIPA-0501.2.637237/2022 tanggal 17 November 2021 dengan nomor Digital Stamp (DS): 7038-7001-6937-9007 dengan total nilai pagu anggaran Rp 4.548.450.000 (empat milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Per 31 Desember 2022, BPS Kota Bontang telah melakukan 16 kali revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Revisi ke-1 dilakukan dalam rangka blokir anggaran Tunjangan Kinerja Satker.

<b>Kode</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>SEMULA</b>	<b>MENJADI</b>	<b>SELISIH</b>
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	25.077.000	25.077.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	6.440.000	6.440.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	8.492.000	8.492.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	8.765.000	8.765.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	67.874.000	67.874.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	117.978.000	117.978.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	571.748.000	571.748.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	204.820.000	204.820.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	7.259.000	7.259.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	27.282.000	27.282.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	84.367.000	84.367.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	3.087.000	3.087.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	105.223.000	105.223.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.251.169.000	3.251.169.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24.787.000	24.787.000	-
Total		4.548.450.000	4.548.450.000	-

- b. Revisi ke-2 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran berdasarkan surat PA (Pengguna Anggaran) Nomor : B.018/01000/PR.400/01/2002.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	25.077.000	29.886.000	4.809.000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	6.440.000	21.772.000	15.332.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	8.492.000	27.846.000	19.354.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	8.765.000	33.811.000	25.046.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	67.874.000	68.085.000	211.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	117.978.000	146.962.000	28.984.000
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	571.748.000	871.608.000	299.860.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	204.820.000	249.762.000	44.942.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	7.259.000	9.180.000	1.921.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	27.282.000	28.388.000	1.106.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	84.367.000	112.689.000	28.322.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	3.087.000	3.087.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	105.223.000	217.023.000	111.800.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.251.169.000	3.251.169.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24.787.000	24.787.000	-
Total		4.548.450.000	5.130.137.000	581.687.000

c. Revisi ke-3 dilakukan dalam rangka pemutahiran Halaman 3 DIPA.

<b>Kode</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>SEMULA</b>	<b>MENJADI</b>	<b>SELISIH</b>
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	29.886.000	29.886.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	21.772.000	21.772.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	27.846.000	27.846.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.811.000	33.811.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	68.085.000	68.085.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	146.962.000	146.962.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	871.608.000	871.608.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	249.762.000	249.762.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	28.388.000	28.388.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	112.689.000	112.689.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	3.087.000	3.087.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	217.023.000	217.023.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.251.169.000	3.251.169.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24.787.000	24.787.000	-
Total		5.130.137.000	5.130.137.000	-

- d. Revisi ke-4 dilakukan berdasarkan surat SESTAMA No B-258/02000/PR.440/04/2022 dalam rangka rencana penyesuaian kegiatan pada Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Tahun Anggaran 2022.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	29.886.000	31.845.000	1.959.000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	21.772.000	21.772.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	27.846.000	27.846.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.811.000	33.811.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	68.085.000	69.754.000	1.669.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	146.962.000	140.452.000	-6.510.000
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	871.608.000	897.265.000	25.657.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	249.762.000	230.442.000	-19.320.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	28.388.000	29.006.000	618.000
2908.QMA	Data dan Informasi Publik		14.300.000	14.300.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	112.689.000	132.027.000	19.338.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	3.087.000	4.648.000	1.561.000
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	217.023.000	217.023.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.251.169.000	3.251.169.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24.787.000	30.187.000	5.400.000
Total		5.130.137.000	5.174.809.000	44.672.000

- e. Revisi ke-5 dilakukan berdasarkan surat KEPALA BPS No B-186/01000/PR.440/05/2022 dalam rangka Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Mei 2022.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	31.845.000	31.845.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	21.772.000	21.772.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	27.846.000	27.846.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.811.000	33.811.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	69.754.000	69.754.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	140.452.000	140.452.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	897.265.000	897.265.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	230.442.000	230.442.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	29.006.000	29.006.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	14.300.000	14.300.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	132.027.000	132.027.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	217.023.000	217.023.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.251.169.000	3.251.169.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30.187.000	30.187.000	-
Total		5.174.809.000	5.174.809.000	-

- f. Revisi ke-6 dilakukan berdasarkan Revisi anggaran dilakukan dalam rangka Pemutahiran Halaman 3 DIPA dan Pemutahiran POK.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	31.845.000	31.845.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	21.772.000	21.772.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	27.846.000	27.846.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.811.000	33.811.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	69.754.000	69.754.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	140.452.000	140.452.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	897.265.000	897.265.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	230.442.000	230.442.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	29.006.000	29.006.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	14.300.000	14.300.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	132.027.000	132.027.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	217.023.000	217.023.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.251.169.000	3.251.169.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30.187.000	30.187.000	-
Total		5.174.809.000	5.174.809.000	-

- g. Revisi ke-7 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan pada Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Tahun Anggaran 2022 sesuai surat Sestama Nomor B-501/02000/PR.440/07/2022

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	31.845.000	31.845.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	21.772.000	21.772.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	27.846.000	27.846.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.811.000	33.811.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	69.754.000	72.855.000	3.101.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	140.452.000	140.452.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	897.265.000	897.265.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	230.442.000	230.442.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	29.006.000	29.006.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	14.300.000	14.300.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	132.027.000	132.027.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	217.023.000	228.549.000	11.526.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.251.169.000	3.551.169.000	300.000.000
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30.187.000	30.187.000	-
Total		5.174.809.000	5.174.809.000	5.489.436.000

- h. Revisi ke-8 dilakukan dalam rangka penambahan anggaran Kegiatan Pendataan Awal Regsosek Tahun Anggaran 2022 sesuai surat Sestama Nomor B-585/02000/PR.440/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	31.845.000	31.845.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	21.772.000	21.772.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	27.846.000	27.846.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.811.000	33.811.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	72.855.000	72.855.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	140.452.000	140.452.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	897.265.000	897.265.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	230.442.000	230.442.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	-	1.923.123.000	1.923.123.000
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	29.006.000	29.006.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	14.300.000	14.300.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	132.027.000	132.027.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	228.549.000	228.549.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.551.169.000	3.551.169.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.000.000	1.000.000	-
Total		5.174.809.000	30.187.000	30.187.000

i. Revisi ke-9 dilakukan dalam rangka membuka Blokir pada anggaran Regsosek

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	31.845.000	31.845.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	21.772.000	21.772.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	27.846.000	27.846.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.811.000	33.811.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	72.855.000	72.855.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	140.452.000	140.452.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	897.265.000	897.265.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	230.442.000	230.442.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	1.923.123.000	1.923.123.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	29.006.000	29.006.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	14.300.000	14.300.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	132.027.000	132.027.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	228.549.000	228.549.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.551.169.000	3.551.169.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.000.000	1.000.000	-
Total		5.174.809.000	30.187.000	30.187.000

j. Revisi ke-10 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran kegiatan Regsosek

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	31.845.000	31.845.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	21.772.000	21.772.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	27.846.000	27.846.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.811.000	33.811.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	72.855.000	72.855.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	140.452.000	140.452.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	897.265.000	897.265.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	230.442.000	230.442.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	1.923.123.000	1.923.123.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	29.006.000	29.006.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	14.300.000	14.300.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	132.027.000	132.027.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	228.549.000	228.549.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.551.169.000	3.551.169.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.000.000	1.000.000	-
Total		5.174.809.000	30.187.000	30.187.000

k. Revisi ke-11 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran kegiatan Regsosek

<b>Kode</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>SEMULA</b>	<b>MENJADI</b>	<b>SELISIH</b>
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.710.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	31.845.000	31.845.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	21.772.000	21.772.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	27.846.000	27.846.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.811.000	33.811.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	72.855.000	72.855.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	140.452.000	140.452.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	897.265.000	897.265.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	230.442.000	230.442.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	1.923.123.000	1.923.123.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	29.006.000	29.006.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	14.300.000	14.300.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	132.027.000	132.027.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	228.549.000	228.549.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.551.169.000	3.551.169.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30.187.000	30.187.000	-
Total		7.412.559.000	7.412.559.000	-

1. Revisi ke-12 dilakukan dalam rangka Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai dan Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.710.000	30.698.000	12.000)
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	31.845.000	34.749.000	2.904.000
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	21.772.000	20.315.000	(1.457.000)
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	27.846.000	26.599.000	(1.247.000)
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.811.000	33.692.000	(119.000)
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	72.855.000	72.555.000	(300.000)
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	140.452.000	140.452.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	897.265.000	897.265.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	230.442.000	230.442.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	1.923.123.000	1.923.123.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	29.006.000	31.161.000	2.155.000
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	14.300.000	14.300.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	132.027.000	132.027.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	228.549.000	228.549.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.551.169.000	3.655.483.000	104.314.000
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30.187.000	30.187.000	-
Total		7.412.559.000	7.518.797.000	106.238.000

m. Revisi ke-13 dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran kegiatan Regsosek dan Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.698.000	30.698.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	34.749.000	34.749.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	20.315.000	20.315.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	26.599.000	26.599.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.692.000	33.692.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	72.555.000	72.555.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	140.452.000	140.452.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	897.265.000	897.265.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	230.442.000	230.442.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	9.180.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	1.923.123.000	1.923.123.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	31.161.000	31.161.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	14.300.000	14.300.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	132.027.000	132.027.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	228.549.000	228.549.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.655.483.000	3.662.940.000	7.457.000
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30.187.000	30.187.000	-
Total		7.518.797.000	7.526.254.000	7.457.000

- n. Revisi ke-14 dilakukan dalam rangka Realokasi Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai surat No. B-076/64511/PR.440/11/2022

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	30.698.000	22.930.000	(7.768.000)
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	34.749.000	33.365.000	(1.384.000)
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	20.315.000	16.667.000	(3.648.000)
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	26.599.000	13.945.000	(12.654.000)
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	33.692.000	26.396.000	(7.296.000)
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	72.555.000	70.449.000	(2.106.000)
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	140.452.000	129.955.000	(10.497.000)
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	897.265.000	857.350.000	(39.915.000)
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	230.442.000	219.808.000	(10.634.000)
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	9.180.000	3.920.000	(5.260.000)
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	1.923.123.000	1.923.123.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	31.161.000	28.263.000	(2.898.000)
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	14.300.000	12.725.000	(1.575.000)
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	132.027.000	22.279.000	(109.748.000)
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	228.549.000	224.148.000	(4.401.000)
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.662.940.000	3.662.940.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30.187.000	27.909.000	(2.278.000)
Total		7.526.254.000	7.304.192.000	(222.062.000)

o. Revisi ke-15 dilakukan dalam rangka Pemutahiran POK melalui aplikasi SAKTI

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	22.930.000	22.930.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	33.365.000	33.365.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	16.667.000	16.667.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	13.945.000	13.945.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	26.396.000	26.396.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	70.449.000	70.449.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	129.955.000	129.955.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	857.350.000	857.350.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	219.808.000	219.808.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	3.920.000	3.920.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	1.923.123.000	1.923.123.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	28.263.000	28.263.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	12.725.000	12.725.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	22.279.000	22.279.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	224.148.000	224.148.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.662.940.000	3.662.940.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	27.909.000	27.909.000	-
Total		7.304.192.000	7.304.192.000	-

p. Revisi ke-16 dilakukan dalam rangka Pemutahiran POK dan Pemutahiran Hal 3 DIPA

Kode	Deskripsi	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2897.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.832.000	1.832.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	22.930.000	22.930.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	33.365.000	33.365.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	16.667.000	16.667.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	540.000	540.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	13.945.000	13.945.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	26.396.000	26.396.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	70.449.000	70.449.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	129.955.000	129.955.000	-
2905.QMA	Data dan Informasi Publik	857.350.000	857.350.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	219.808.000	219.808.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	3.920.000	3.920.000	-
2907.QMA	Data dan Informasi Publik	1.923.123.000	1.923.123.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	28.263.000	28.263.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	12.725.000	12.725.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	22.279.000	22.279.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	4.648.000	4.648.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	224.148.000	224.148.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.662.940.000	3.662.940.000	-
2886.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000.000	1.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	27.909.000	27.909.000	-
Total		7.304.192.000	7.304.192.000	-